



Etika Pertahanan Elit dan Dilema Disinformasi sebagai Instrumen Deterrence dalam Perang Hibrida Indonesia 2020–2025

Elite Defense Ethics and the Dilemma of Disinformation as a Deterrence Instrument in Indonesia's Hybrid Warfare (2020–2025)

Faradila Nur Adeli

Fakultas Strategi Pertahanan, UNHAN RI

Faradilana27@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini menganalisis konflik normatif dan strategis yang muncul ketika disinformasi digunakan sebagai instrumen deterrence (daya tangkal) dalam konteks Perang Hibrida Indonesia antara tahun 2020 dan 2025. Perang Hibrida di Indonesia melibatkan spektrum instrumen yang luas, termasuk manipulasi informasi, yang digunakan oleh aktor-aktor elit, baik untuk tujuan strategis eksternal maupun kontrol domestik. Dengan menggunakan kerangka etika konsekuensial dan deontologis, didukung oleh konsep Meaningful Human Control (MHC), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan disinformasi oleh elit menciptakan paradoks strategis: meskipun mungkin efektif dalam jangka pendek untuk deception atau signaling, praktik ini secara fundamental merusak akuntabilitas elit dan mengikis kepercayaan publik, yang merupakan pilar krusial dari Ketahanan Nasional. Analisis menunjukkan bahwa represi digital dan lawfare oleh elit politik telah mengubah alat pertahanan hibrida menjadi ancaman internal terhadap integritas demokrasi. Disarankan agar Indonesia menggeser paradigma deterrence dari manipulasi informasi (disinformasi) menuju penguatan ketahanan publik (resilience) melalui literasi digital dan penegakan kerangka akuntabilitas etis yang adaptif terhadap operasi informasi yang terotomatisasi.

Kata Kunci : Deterrence, Disinformasi, Etika Pertahanan Elit, Perang Hibrida, Ketahanan Nasional, Akuntabilitas.

Abstract : This study analyzes the normative and strategic conflicts that arise when disinformation is utilized as an instrument of deterrence within the context of Indonesia's

Hybrid Warfare landscape between 2020 and 2025. Hybrid Warfare in Indonesia involves a broad spectrum of instruments, including information manipulation, employed by elite actors for both external strategic objectives and domestic control. Using consequentialist and deontological ethical frameworks, supplemented by the concept of Meaningful Human Control (MHC), the research finds that the elite use of disinformation creates a strategic paradox: while it may be tactically effective in the short term for deception or signaling, this practice fundamentally undermines elite accountability and erodes public trust, a crucial pillar of National Resilience (Ketahanan Nasional). The analysis indicates that digital repression and lawfare employed by political elites have transformed hybrid defense tools into an internal threat to democratic integrity. It is recommended that Indonesia shifts its deterrence paradigm from information manipulation (disinformation) toward strengthening public resilience through digital literacy and enforcing an ethical accountability framework that is adaptive to automated information operations.

Keywords : Deterrence, Disinformation, Elite Defense Ethics, Hybrid Warfare, National Resilience, Accountability.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Strategis Indonesia (2020 - 2025) dan Perang Hibrida

Periode 2020 hingga 2025 menandai fase krusial dalam evolusi ancaman keamanan Indonesia. Negara ini menghadapi tantangan yang melampaui konflik perbatasan tradisional dan perselisihan wilayah dengan negara-negara tetangga.² Ancaman di era modern bersifat kompleks dan dinamis, mencakup serangan siber, propaganda digital, dan perang informasi yang memiliki potensi merusak stabilitas negara (Manafe et al., 2023).² Transformasi teknologi yang pesat, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI), sistem persenjataan otomatis, dan drone, menuntut strategi pertahanan nasional yang adaptif. Konsekuensinya, strategi pertahanan tidak lagi cukup mengandalkan kekuatan militer kinetik semata, melainkan harus diperkuat dengan ketahanan siber dan teknologi informasi.²

Konsep Perang Hibrida mendefinisikan peperangan modern yang tidak lagi

dibatasi pada satu atau dua instrumen saja (misalnya, politik dan militer). Model ini diketahui menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki oleh suatu aktor baik dari militer, politik, ekonomi, sipil, dan informasi untuk mencapai tujuan strategis (Putra et al., 2025).³ Dalam konteks Indonesia, potensi ancaman Perang Hibrida telah menjadi skenario yang diperkirakan terjadi, didorong oleh meluasnya konflik geopolitik di Laut Cina Selatan yang berpotensi menarik Indonesia ke dalam pusaran konflik informasi (Putra et al., 2025).³

Periode 2020 - 2025 juga ditandai oleh dinamika politik domestik yang intens, termasuk pemilihan umum dan peningkatan polarisasi sosial.¹ Dalam lingkungan yang sangat terfragmentasi dan rentan terhadap sentimen anti elit⁴, peran informasi sebagai instrumen strategis, baik oleh aktor eksternal maupun internal, menjadi sangat menentukan. Pemerintah sendiri telah mengakui ruang siber sebagai medan baru dalam pertahanan nasional.⁵

1.2 Perumusan Masalah dan Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan konsep Perang Hibrida, disinformasi (penyebaran informasi palsu dengan niat menipu) dapat diangkat menjadi instrumen deterrence. Deterrence non-kinetik dapat diupayakan melalui deception, misalnya dengan menyebarkan narasi yang menyesatkan lawan mengenai kemampuan atau niat strategis Indonesia. Namun, ketika disinformasi digunakan sebagai alat strategis oleh elit pertahanan atau politik, muncul konflik normatif yang mendasar.

Masalah utama penelitian ini adalah sejauh mana penggunaan manipulasi informasi yang bertujuan strategis (yakni, deterrence terhadap aktor eksternal atau stabilisasi internal) dapat dibenarkan secara moral dan etis, mengingat konsekuensinya terhadap akuntabilitas elit, tata kelola yang baik (good governance), dan kepercayaan publik.

Signifikansi penelitian ini sangat penting bagi studi strategis dan kebijakan

pertahanan di Indonesia. Pertama, penelitian ini menjembatani teori deterrence nonkinetik dengan etika terapan, sebuah area yang jarang dieksplorasi secara mendalam. Kedua, penelitian ini menyoroti resiko strategis internal yang dihasilkan dari taktik yang dirancang untuk keamanan eksternal. Apabila elit gagal menjaga integritas etisnya (misalnya, dengan menggunakan alat informasi strategis untuk represi domestik), Ketahanan Nasional (Ketnas) secara keseluruhan akan melemah, meskipun ancaman eksternal mungkin tertahan. Kontribusi ini penting dalam konteks regresi demokrasi yang dilaporkan terjadi di Indonesia, di mana ruang sipil semakin terbatas melalui instrumen represi digital.¹

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1.1 Etika Pertahanan Elit dan Akuntabilitas Tata Kelola

Elit pertahanan yang mencakup kepemimpinan militer, pembuat kebijakan di Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan pemangku kepentingan strategis lainnya memiliki kewajiban moral dan etis yang tinggi dalam menjalankan fungsi keamanan nasional. Etika pertahanan yang kuat mensyaratkan adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang transparan. Menurut laporan internasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2019), negara dengan sistem pengawasan yang kuat cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.⁶

Selain aspek hukum, etika juga berfungsi sebagai fondasi efektivitas operasional. Sebuah studi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip etika cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja dan kontribusi positif yang lebih tinggi (American Psychological Association, 2020).⁶ Dalam organisasi birokrasi pertahanan, etika elit diperkuat melalui pembangunan sistem pengawasan, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan pendorong partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara internal didengar dan dihargai (Harefa, 2025).⁶ Ketika prinsip-prinsip ini dikesampingkan atas nama kebutuhan

strategis, integritas kelembagaan pertahanan akan terkompromi.

1.2 Konseptualisasi Disinformasi sebagai Instrumen Strategis

Disinformasi didefinisikan secara khusus sebagai penyebaran informasi palsu dengan niat untuk menipu atau menyesatkan publik atau lawan strategis (Sarjito, 2021).⁷ Berbeda dengan misinformation (penyebaran informasi keliru tanpa niat jahat), disinformasi memiliki tujuan yang terencana. Secara strategis, instrumen ini merupakan komponen vital dalam operasi informasi di medan Perang Hibrida.

Dalam konteks deterrence nonkinetik, disinformasi dapat digunakan sebagai sarana strategic deception untuk menciptakan ambiguitas atau melebih-lebihkan kemampuan pertahanan, dengan harapan menghalangi perhitungan strategis lawan.⁸ Namun, dimensi strategis ini segera berbenturan dengan dimensi etis dan domestik. Disinformasi merupakan ancaman multidimensi yang merusak institusi demokrasi, memperuncing polarisasi sosial, dan melemahkan pilar-pilar Ketahanan Nasional khususnya pada aspek sosial, digital, dan psikologis (Lemhannas, 2024).¹⁰

Tantangan etis diperparah oleh kesulitan legal dalam membuktikan niat (*mens rea*) di balik penyebaran informasi palsu (Appelman et al., 2022). Karena sulit membuktikan apakah elit bertindak dengan maksud menipu atau hanya melakukan strategic signaling yang ambigu, ruang abu-abu ini sering dieksploitasi untuk menghindari akuntabilitas.

1.3 Kerangka Teori untuk Analisis Etis

Analisis dilema etika pertahanan dalam menghadapi disinformasi dapat dipandang melalui dua kerangka etika utama :

a. Etika Konsekuensial vs. Deontologis :

- 1) Konsekuensial : dalam kerangka ini, tindakan disinformasi dapat dibenarkan jika menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi keamanan nasional (misalnya, mencegah konflik kinetik, menjaga stabilitas politik,

atau mencapai deterrence yang efektif). Elit yang mengadopsi pandangan ini percaya bahwa hasil positif (keamanan) membenarkan metode yang digunakan (kebohongan / manipulasi).

- 2) Deontologis : kerangka ini berfokus pada kewajiban moral. Elit pertahanan memiliki kewajiban intrinsik terhadap transparansi, kejujuran, dan penghormatan terhadap integritas publik. Dari perspektif ini, penggunaan kebohongan, bahkan jika tujuannya baik, secara moral tidak dapat dibenarkan karena melanggar kewajiban etis dasar.

b. Meaningful Human Control (MHC) dan Akuntabilitas Algoritmik : Seiring operasi informasi strategis semakin mengandalkan sistem berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dan Machine Learning (ML) , isu akuntabilitas menjadi lebih mendesak. Mengambil inspirasi dari perdebatan etika Autonomous Weapon Systems (AWS), prinsip Meaningful Human Control (MHC) menegaskan bahwa keputusan yang memiliki dampak moral atau strategis tinggi harus tunduk pada pertimbangan moral manusia. Prinsip ini harus diterapkan pada operasi informasi dan elit pertahanan harus menjamin adanya "rantai kewajiban bersama" (chain of shared obligations) untuk mencegah hilangnya pertanggungjawaban moral di balik logika otomatisasi algoritmik. Kerangka ini penting untuk mengatasi praktik represi digital yang menggunakan buzzer otomatis.¹

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada studi kebijakan dan analisis strategis. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis dilema etis serta implikasi kebijakan yang muncul dari penggunaan disinformasi sebagai instrumen deterrence dalam

dinamika Perang Hibrida Indonesia dari tahun 2020 hingga 2025. Metode ini selaras dengan studi kebijakan pertahanan yang mendalami ancaman multidimensi terhadap Ketahanan Nasional.¹⁰

3.2 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur dan kajian kebijakan yang komprehensif. Sumber utama data sekunder meliputi :

- a. Dokumen Kebijakan Resmi : Laporan dan publikasi dari institusi pertahanan negara seperti Kemhan dan Lemhannas.²
- b. Literatur Akademik Kontemporer (2020 - 2025) : Jurnal dan laporan penelitian yang membahas Perang Hibrida, disinformasi, dan Ketahanan Nasional di Indonesia dan kawasan ASEAN.³
- c. Laporan Lembaga Kredibel : Publikasi yang membahas tren represi digital, polarisasi, dan insiden penyebaran hoaks yang memicu mobilisasi publik.¹

Pembatasan periode 2020 - 2025 memastikan bahwa analisis tetap relevan dengan tantangan kontemporer dan penggunaan teknologi informasi terbaru oleh elit dan lawan.

3.3 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan tiga teknik utama :

- a. Analisis Konten Tematik yaitu mengidentifikasi pola narasi disinformasi yang dominan, baik yang menargetkan kebijakan pertahanan (misalnya, klaim ancaman militer berlebihan atau penyalahgunaan anggaran)¹¹ maupun yang digunakan oleh elit politik domestik (manipulasi wacana, represi digital).¹
- b. Analisis Konflik Etis yaitu praktik-praktik yang teridentifikasi dianalisis menggunakan lensa teori etika (Konsekuensialisme vs. Deontologi) untuk mengevaluasi justifikasi moral tindakan elit. Analisis ini diperkuat dengan penerapan kerangka MHC untuk menilai akuntabilitas dalam operasi informasi

yang terotomatisasi.

- c. Studi Kasus Kontekstual : Analisis mendalam terhadap insiden-insiden spesifik, seperti penggunaan buzzer untuk mengontrol wacana menjelang pemilu 2024 atau peristiwa protes yang dipicu oleh hoaks anti elit pada tahun 2025¹, untuk memahami dampak empiris disinformasi terhadap Ketahanan Nasional dan etika elit.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN : DISINFORMASI SEBAGAI DILEMA STRATEGIS

4.1 Klasifikasi Disinformasi dan Fungsi Deterrence

Dalam menghadapi ancaman hibrida, elit pertahanan memiliki insentif strategis untuk menggunakan disinformasi. Disinformasi berfungsi dalam dua domain utama di Indonesia (2020 - 2025) :

a. Deterrence Eksternal melalui Strategic Deception

Tindakan deterrence diarahkan untuk mengelola persepsi ancaman dari luar, khususnya terkait ketegangan geopolitik (misalnya, Laut Cina Selatan).³ Disinformasi strategis dapat mengambil bentuk penyebaran narasi yang melebih-lebihkan kekuatan militer Indonesia atau, sebaliknya, menyebarkan klaim palsu mengenai kerentanan tertentu untuk memancing lawan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Narasi umum yang diidentifikasi dalam konteks ini mencakup ancaman militer berlebihan dari negara tetangga dan klaim palsu mengenai penyalahgunaan anggaran pertahanan (Neo & Yin, 2023). Jika disinformasi ini bertujuan untuk menciptakan ambiguitas yang menghambat kalkulasi lawan, elit mungkin membenarkannya secara konsekuensial maksudnya hasil (stabilitas kawasan atau penghindaran konflik kinetik) dianggap lebih penting daripada kejujuran dalam beretorika.

b. Kontrol Internal dan Represi Digital

Fungsi kedua disinformasi adalah kontrol politik dan stabilisasi internal. Elit politik, administratif, dan bisnis dilaporkan menggunakan buzzer untuk menyebarkan disinformasi, memanipulasi wacana, dan mendelegitimasi kritik terhadap kebijakan atau pejabat (Eklöf, 2024).¹ Penggunaan Lawfare yang merupakan sistematisasi dalam menerapkan undang-undang (seperti UU ITE) untuk mengintimidasi jurnalis, aktivis, dan akademisi dapat berfungsi sebagai deterrence yang diarahkan ke dalam negeri, menciptakan lingkungan yang menakutkan bagi kalangan masyarakat sipil.

Ironisnya, alat yang seharusnya digunakan untuk melawan musuh eksternal dalam Perang Hibrida kini disalahgunakan untuk menekan suara domestik. Hal ini menimbulkan kontradiksi etis yang mendalam, di mana instrumen negara dialihkan untuk kepentingan partisan, bukan untuk keamanan nasional yang objektif.

4.2 Konflik Normatif : Etika Pertahanan Elit dan Menurunnya Kepercayaan

Penggunaan disinformasi untuk kontrol internal menimbulkan konflik etis yang paling parah, secara langsung menantang akuntabilitas elit.⁶ Hal itu karena :

Pertama, secara deontologis, penggunaan kebohongan dan represi digital melanggar kewajiban moral elit terhadap kejujuran dan transparansi. Elit yang seharusnya menjadi pilar integritas dan etika birokrasi, kini menjadi aktor yang menyebarkan manipulasi.⁶ Kegagalan membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memadai membuka peluang bagi pelanggaran etika ini.⁶

Kedua, secara strategis, penggunaan disinformasi oleh elit adalah tindakan yang bersifat merusak diri sendiri (self defeating). Meskipun elit mungkin bertujuan untuk stabilitas, disinformasi yang disebarakan mereka malah memperkuat polarisasi masyarakat dan sentimen anti elit yang sudah ada.⁴

Kasus protes akhir Agustus 2025 di Indonesia, yang dipicu oleh video deepfake

dan misinformasi anti elit yang beresonansi dengan ketidakpuasan ekonomi yang meluas, menunjukkan bagaimana konten palsu dapat memobilisasi kemarahan publik. Bahkan setelah penyangkalan resmi dan klarifikasi, kemarahan publik tetap bertahan karena narasi tersebut sesuai dengan pengalaman hidup dan persepsi kebijakan yang mengabaikan rakyat (Eklöf, 2024; Tapsell, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa disinformasi, ketika digunakan sebagai instrumen kontrol, menghasilkan erosi kronis terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah, institusi, dan pertahanan nasional.⁷ Kepercayaan adalah elemen non-militer esensial dari Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, deterrence berbasis disinformasi, meskipun efektif secara taktis, secara strategis bersifat paradoks, karena melemahkan Ketahanan Nasional dari dalam.

4.3 Tantangan Akuntabilitas Dalam Operasi Informasi Strategis

Tantangan akuntabilitas diperumit oleh sifat operasi informasi yang seringkali berada dalam batas legalitas yang samar. Untuk mengatasi masalah ini, akuntabilitas tidak lagi hanya berfokus pada individu dan pembuktian niat jahat (*mens rea*).

Dalam lingkungan informasi yang semakin terotomatisasi, di mana keputusan penyebaran narasi strategis dapat dibantu oleh Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML), elit pertahanan harus mengadopsi kerangka akuntabilitas yang lebih kuat. Prinsip Meaningful Human Control (MHC) harus menjadi standar dan memastikan bahwa keputusan yang bersifat strategis dan berimplikasi moral selalu melibatkan pertimbangan etis manusia, bukan sekadar logika algoritmik (Goodall, 2025). Kerangka ini memungkinkan pembentukan "rantai kewajiban bersama" (*chain of shared obligations*) (Tapsell, 2025), selain itu dapat mendistribusikan tanggung jawab etis di sepanjang rantai komando, sehingga mencegah pengaburan akuntabilitas di balik anonimitas dunia maya atau otomatisasi.

Analisis konflik ini dirangkum dalam tabel berikut, yang memetakan hubungan

antara instrumen Perang Hibrida dan dampak etisnya di Indonesia.

| Instrumen Perang Hibrida (Hoffman) | Fungsi Disinformasi Terkait | Dampak pada Etika Elit/Kepercayaan Publik |
|------------------------------------|--|--|
| Militer / Pertahanan | Narasi Ancaman yang dibesarkan / klaim penyalahgunaan anggaran | Erosi kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan dan manajemen sumber daya |
| Politik / Pemerintahan | Manufaktur narasi, Lawfare, Represi Digital terhadap Kritik | Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan partisan, polarisasi sosial, pelemahan demokrasi |
| Informasi / Siber | Propaganda Digital, Penyebaran Hoaks, Buzzing Terkoordinasi | Kaburnya batasan fakta / opini, kesulitan pembuktian niat (mens rea), mengurangi ruang sipil |
| Sipil / Sosial | Eksploitasi sentimen anti elit dan ketidakpuasan ekonomi | Mobilisasi kemarahan publik, fragmentasi masyarakat, |



| | | |
|--|--|--|
| | | ketidakstabilan sosial bahkan setelah klarifikasi |
|--|--|--|

4.4 IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI KERANGKA ETIS

4.4.1 Penguatan Tata Kelola Informasi Nasional dan Ketahanan Digital

Mengingat ruang siber adalah medan baru pertahanan nasional ⁵, strategi deterrence Indonesia harus bergeser dari manipulasi informasi menuju penguatan ketahanan masyarakat. Strategi ini harus didukung oleh kebijakan publik yang inklusif, seperti penguatan Sistem Kesehatan Nasional dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mengurangi potensi konflik sosial.¹²

Pemerintah telah mempromosikan inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model untuk ASEAN, menekankan bahwa literasi bukan hanya keterampilan teknis tetapi fondasi pemikiran kritis (Yahya, 2025).

Peningkatan kemampuan ini adalah kunci untuk memastikan masyarakat mampu menyaring informasi secara mandiri, yang secara efektif berfungsi sebagai deterrence publik terhadap disinformasi.

Secara regulatif, telah dikeluarkan kebijakan seperti Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dan PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).¹³ Namun, ada kebutuhan kritis untuk mencegah penyalahgunaan regulasi ini sebagai alat represi digital, seperti yang terjadi melalui lawfare (Eklöf, 2024).

Model peningkatan kemampuan informasi yang komprehensif, seperti kerangka Sense Deter Collaborate yang menekankan kolaborasi multi pemangku kepentingan, dapat diadopsi dari studi kebijakan regional (Lemhannas, 2024).¹⁰

4.4.2 Rekonstruksi Etika Pertahanan Elit

Untuk mengatasi paradoks strategis di mana deterrence yang tidak etis melemahkan Ketahanan Nasional, elit pertahanan harus melalui rekonstruksi etika kelembagaan yang serius.

a. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas

Badan-badan strategis seperti Lemhannas harus memprioritaskan pembentukan karakter kepemimpinan yang kuat, beretika, dan berintegritas.⁷ Ini mencakup penguatan fungsi riset strategis yang mendalami dinamika generasi muda dan partisipasi politik digital.¹⁴ Membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ketat dan independen adalah esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di ranah digital.⁶

b. Penerapan Meaningful Human Control (MHC)

Elit pertahanan wajib mengembangkan dan menerapkan protokol etika

kecerdasan buatan (AI) secara eksplisit dalam operasi informasi. Setiap operasi strategis yang menggunakan otomatisasi untuk menyebarkan narasi (baik deception eksternal maupun buzzing internal) harus menjamin adanya Meaningful Human Control (MHC). Hal ini memastikan bahwa meskipun kecepatan analisis AI dimanfaatkan, keputusan akhir untuk menyebarkan informasi yang menipu tetap tunduk pada pertimbangan etika dan moral manusia (Tapsell, 2025). Penerapan MHC akan memulihkan dimensi moral yang hilang akibat praktik algorithmic violence naratif dan memungkinkan pertanggungjawaban di sepanjang rantai keputusan, alih-alih dilusi di bawah teori kolektif yang ambigu.

4.4.3 Pembelajaran Komparatif Regional

Indonesia telah mengambil peran kepemimpinan di ASEAN, mendesak negara-negara kawasan untuk memprioritaskan pemberantasan hoaks dan keamanan anak di dunia digital (Yahya, 2025).¹³ Pengalaman negara-negara tetangga (misalnya, Singapura dengan kerangka Pertahanan Totalnya) menunjukkan bahwa strategi efektif melawan disinformasi harus berpusat pada pembangunan ketahanan publik, bukan hanya pada upaya regulatif atau penghapusan konten.¹⁰ Strategi ini secara fundamental lebih etis karena memberdayakan warga negara alih-alih menganggap mereka sebagai target manipulasi.

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Prinsip Etika Pertahanan | Manifestasi Dilema Disinformasi | Risiko Strategis Jangka Panjang | Rekomendasi Kebijakan Kritis |
|-------------------------------------|--|--|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Transparansi dan Integritas</p> | <p>Penggunaan buzzer atau saluran non negara yang didukung elit untuk propaganda</p> | <p>Kredibilitas institusi pertahanan di mata domestik dan internasional menurun drastis</p> | <p>Penguatan sistem pengawasan etika independen dan audit narasi strategis</p> |
| <p>Akuntabilitas Hukum (Mens Rea)</p> | <p>Kesulitan membuktikan niat dalam operasi informasi yang terotomatisasi atau ambigu</p> | <p>Kegagalan menuntut pertanggungjawaban elit, penguatan budaya impunitas</p> | <p>Revisi kerangka akuntabilitas untuk menyertakan model "Chain of Shared Obligations" (berbasis kerangka MHC)</p> |
| <p>Kontrol Manusia yang Berarti (MHC)</p> | <p>Keputusan penyebaran narasi strategis didasarkan pada analisis / rekomendasi otomatis AI / ML</p> | <p>Hilangnya dimensi moral seperti potensi algorithmic violence naratif, mengancam Ketnas</p> | <p>Penerapan kerangka Etika AI Pertahanan yang eksplisit dan wajib di Kemhan / militer</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Netralitas dan Kepentingan Nasional | Penggunaan disinformasi untuk menekan kritik domestik atau mendukung kepentingan politik tertentu | Polarisasi sosial yang kronis, degradasi demokrasi, pelemahan Ketahanan Nasional | Penegasan kembali etika birokrasi pertahanan: Pelayanan publik di atas kepentingan partisan |
|---|---|--|--|

5. KESIMPULAN

Dilema Etika Pertahanan Elit dalam Perang Hibrida Indonesia 2020 - 2025 terletak pada konflik yang tidak dapat dihindari antara keuntungan strategis taktis dari disinformasi (sebagai instrumen deterrence) dan kerusakan etis serta strategis jangka panjang yang diakibatkannya. Analisis menunjukkan bahwa upaya elit untuk mengontrol narasi, terutama melalui represi digital dan penggunaan instrumen manipulatif seperti buzzer, telah mengikis kepercayaan publik, mengubah ancaman hibrida eksternal menjadi kerentanan internal yang akut. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip deontologis akuntabilitas dan transparansi yang diwajibkan oleh etika birokrasi pertahanan.⁶

Penggunaan disinformasi sebagai deterrence adalah paradoks strategis maksudnya adalah ia memperkuat keamanan taktis sambil melemahkan ketahanan strategis bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia harus menggeser paradigma deterrence Perang Hibrida dari manipulasi (deception) ke Ketahanan Nasional (resilience) yang dibangun di atas fondasi integritas elit dan literasi digital masyarakat.¹³ Rekomendasi kunci adalah adopsi kerangka



akuntabilitas yang adaptif, seperti prinsip Meaningful Human Control (MHC), untuk memastikan bahwa operasi informasi strategis terutama yang melibatkan teknologi otomatis tetap tunduk pada pertimbangan moral manusia (Tapsell, 2025).

Arah Penelitian Masa Depan

Studi di masa depan harus fokus pada pengukuran dampak empiris jangka panjang dari Lawfare dan penggunaan buzzer oleh institusi negara terhadap metrik Ketahanan Nasional Indonesia, seperti tingkat kepercayaan antar komunitas, kualitas demokrasi, dan partisipasi sipil.

REFERENSI

- American Psychological Association. (2020). *[Laporan penelitian tentang prinsip etika dan kepuasan kerja organisasi]*.⁶
- Appelman, A., Van der Velden, L., De Vries, E., & Veldhuis, A. (2022). **.
- Eklöf, S. (2024). The rise of digital repression in Indonesia under Joko Widodo. *GIGA Focus*, [Volume/Issue tidak tersedia].
<https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/the-rise-of-digital-repression-in-indonesia-under-joko-widodo>.¹
- Harefa, F. (2025, 14 Januari). Etika dalam organisasi birokrasi. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI*. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/01/14/etika-dalam-organisasi-birokrasi.html>.⁶
- Lemhannas. (2024). Peningkatan kemampuan informasi guna mencegah disinformasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional Singapura.
- Manafe, T. S., Nurlatifah, M., & et al. (2023). Peran penting aspek kebijakan pertahanan dalam mencapai sistem keamanan nasional Republik Indonesia. *Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI*. (<https://www.kemhan.go.id/pothen/wp->



content/uploads/2025/02/Peran-Penting-Aspek-Kebijakan-Pertahanan-dalam-Mencapai-Sistem-Keamanan-Nasional-Republik-Indonesia.pdf).²

Neo, W. P., & Yin, C. (2023). Disinformation's influence on public perception and defense policy implementation in Indonesia. [*Jurnal atau Laporan penelitian*].

Putra, F. A., Navalinoi, D. A., & Suwarno, P. (2025). Defense strategies in responding to hybrid threats amid geopolitical turmoil and global economic uncertainty. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science (AJMESC)*, 5(04). <https://doi.org/10.63922/ajmesc.v5i04.1486>.³

Radchenko, Y., et al. (2023). Dinamika konsep keamanan-pertahanan Ukraina pasca invasi Rusia sebagai pembelajaran bagi Indonesia. [*Jurnal atau Laporan penelitian*].⁸

Sarjito, A. (2021). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 175–186.

Tapsell, R. (2025). Elites vs. ordinary people: How representations turned a hoax into mobilisation. *Australian Outlook*.

<https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/elites-vs-ordinary-people-how-representations-turned-a-hoax-into-mobilisation/>.

Tapsell, R. (2025). Reconfiguring accountability: toward a governance framework. *Nordic Journal of Human Rights*, [Volume/Issue tidak tersedia].

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16544951.2025.2540131>.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). [*Laporan tentang sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk mengurangi korupsi*].⁶

Yahya, F. A. (2025, 8 Mei). Menkomdigi: Ruang siber jadi medan baru pertahanan nasional. *Infopublik*.

<https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/919103/index.html>.¹³

Karya yang dikutip

1. The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo - Giga- Hamburg, diakses November 12, 2025, <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/the-rise-of-digital-repression-in-indonesia-under-joko-widodo>
2. peran penting aspek kebijakan pertahanan dalam mencapai sistem keamanan nasional republik indonesia, diakses November 12, 2025, <https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2025/02/Peran-Penting-Aspek-Kebijakan-Pertahanan-dalam-Mencapai-Sistem-Keamanan-Nasional-Republik-Indonesia.pdf>
3. Defense Strategies in Responding to Hybrid Threats Amid Geopolitical Turmoil and Global Economic Uncertainty | Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science, diakses November 12, 2025, <https://ajmesc.com/index.php/ajmesc/article/view/1486>
4. "Elites vs. Ordinary People": How Representations Turned a Hoax into Mobilisation, diakses November 12, 2025, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/elites-vs-ordinary-people-how-representations-turned-a-hoax-into-mobilisation/>
5. Indonesia Ajak ASEAN Prioritaskan Pemberantasan Hoaks dan Keamanan Anak di Ruang Digital - Infopublik.id, diakses November 12, 2025, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/919103/index.html>
6. etika dalam organisasi birokrasi - Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI, diakses November 12, 2025, <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/01/14/etika-dalam-organisasi-birokrasi.html>
7. Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia, diakses November 12, 2025,



<https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/download/1547/871>

8. Rejuvenasi Lemhannas RI guna Mewujudkan Indonesia Maju | PDF - Slideshare, diakses November 12, 2025, <https://www.slideshare.net/slideshow/rejuvenasi-lemhannas-ri-guna-mewujudkan-indonesia-maju/280529592>
9. (PDF) Dinamika Konsep Keamanan-Pertahanan Ukraina Pasca Invasi Rusia Sebagai Pembelajaran Bagi Indonesia - ResearchGate, diakses November 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/393215027_Dinamika_Konsep_Keamanan-Pertahanan_Ukraina_Pasca_Invasi_Rusia_Sebagai_Pembelajaran_Bagi_Indonesia
10. Peningkatan kemampuan informasi guna mencegah disinformasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional Singapura | Perpustakaan Lemhannas RI, diakses November 12, 2025, https://katalog.lemhannas.go.id/index.php?p=show_detail&id=410&keywords=
11. (PDF) Disinformation's Influence on Public Perception and Defense ..., diakses November 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/389835315_Disinformation's_Influence_on_Public_Perception_and_Defense_Policy_Implementation_in_Indonesia
12. Menkomdigi: Ruang Siber Jadi Medan Baru Pertahanan Nasional, diakses November 12, 2025, <https://komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menkomdigi-ruang-siber-jadi-medan-baru-pertahanan-nasional>
13. potensi ancaman perang hibrida di indonesia pada tahun 2023: aktor, metode, dampak, diakses November 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/366290059_POTENSI_ANCAMAN_PERANG_HIBRIDA_DI_INDONESIA_PADA_TAHUN_2023_AKTOR_METODE_DAMPAK



14. Full article: The ethical legitimacy of autonomous Weapons systems:
reconfiguring war accountability in the age of artificial Intelligence - Taylor &
Francis Online, diakses November 12, 2025,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16544951.2025.2540131>